

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERCEPATAN  
SERTIFIKASI TENAGA KERJA KONSTRUKSI  
DI KOTA PALEMBANG**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan**

**Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1**

**Ilmu Administrasi Publik**



**Oleh :**

**Rachmita Siti Pratiwi**

**NIM. 07011381621119**

**Konsentrasi Kebijakan Publik**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2021**

**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERCEPATAN  
SERTIFIKASI TENAGA KERJA KONSTRUKSI  
DI KOTA PALEMBANG**

**SKRIPSI**

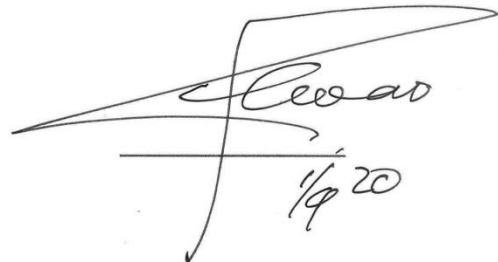
Oleh :

**RACHMITA SITI PRATIWI  
07011381621119**

Telah Disetujui Oleh Dosen Pembimbing, September 2020

**Pembimbing I**

**Drs. Joko Siswanto, M.SI**  
**NIP. 195706051985031003**



Handwritten signature of Drs. Joko Siswanto, M.SI, dated 1/9/20.

**Pembimbing II**

**Dra. Retno Susilowaty, MM.**  
**NIP. 19590520 198503 2003**



Handwritten signature of Dra. Retno Susilowaty, MM.

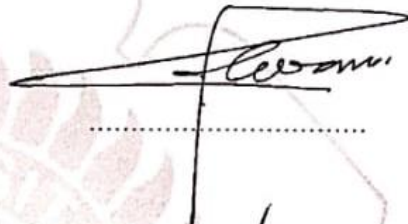
## HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul “Implementasi Kebijakan Percepatan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi di Kota Palembang” telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya pada tanggal 2 Desember 2020.

Palembang, 2 Desember 2020

Ketua

1. Drs. Joko Siswanto, M.SI  
NIP. 195706051985031003

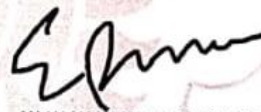


Anggota

2. Dra. Retno Susilowaty, MM.  
NIP. 195905201985032003



3. Dr. Lili Erina, M.SI  
NIP. 196612301992032001



4. Drs. Gatot Budiarto, MS  
NIP. 195806091984031002



Mengetahui,  
Dekan FISIP



Prof. Dr. Kragus Muhammad Sobri, M.Si  
NIP. 196311061990031001

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik



Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA  
NIP. 198108272009121002

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“Bekerja keras dan bersikap baiklah dengan keadaan. Hal itu luar biasa akan terjadi, maka LAKUKANLAH”*

*(Conan O'Brien)*

*“Pengalaman adalah apa yang kita dapatkan ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan”*

*(Enio Carvalho)*

*“Tak selamanya langit itu kelam, Suatu saat akan cerah juga  
Hiduplah dengan sejuta harapan, Habis gelap akan terbitlah  
terang”*

*(Rhoma Irama)*

Skripsi ini ku persembahkan untuk

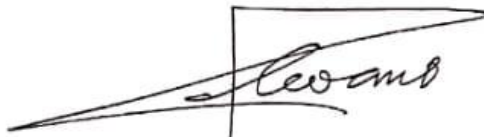
1. Kedua Orang Tua Saya, Ayah Mirza Muhklis dan Ibu Linda Fitria
2. Seluruh Dosen FISIP UNSRI
3. Teman-teman Seperjuangan Administrasi Publik 2016 FISIP UNSRI
4. Alamamater Saya

## ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih banyak tenaga kerja konstruksi di Kota Palembang yang sedikit memiliki sertifikasi sedangkan kebutuhan dibidang konstruksi sangat banyak yang membutuhkan tenaga kerja konstruksi yang terampil dan unggul, sehingga didorongnya peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang konstruksi dengan adanya sertifikasi dan pelatihan bagi tenaga kerja konstruksi sesuai dengan Surat Edaran Walikota Palembang Nomor 64.A/SE/DPUPR/2017 tentang Percepatan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi . Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tenaga kerja konstruksi yang bersertifikasi agar memiliki daya saing yang unggul. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi. Teori yang digunakan adalah teori *Van Horn dan Van Meter* yang terdiri dari enam dimensi yaitu Sasaran dan Standar Kebijakan, Sumber Daya Kebijakan, Karakteristik Agen Pelaksana, Sikap Para Pelaksana, Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana, Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Percepatan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi di Kota Palembang sudah terlaksana dengan baik. Pada penelitian ini, penulis menyarankan untuk memberikan masukan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk hendak melakukan koordinasi dalam pembuatan tempat khusus pelatihan para tenaga kerja konstruksi seperti Balai atau Aula Gedung agar bisa terlaksana lebih baik lagi dan dapat berjalan secara berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Impementasi, Percepatan, Sertifikasi, Tenaga Kerja Konstruksi.

**Pembimbing I**



**Drs. Joko Siswanto, M.SI**  
**NIP. 195706051985031003**

**Pembimbing II**



**Dra. Retno Susilowaty, MM.**  
**NIP. 195905201985032003**

Palembang, Desember 2020  
Ketua Jurusan Administrasi Publik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Sriwijaya



**Zailani Surva Marpaung, S.Sos.MPA**  
**NIP.198108272009121002**

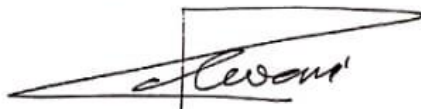


## ABSTRACT

*This research is motivated by the fact that there are still many construction workers in Palembang City who have certification, While the need in the construction sector is very much requiring skilled and superior construction workers, so that the increase in improving the quality of human resources in the construction sector with certification and training for construction workers in accordance with the Circular of the Mayor of Palembang Number 64.A/SE/DPUPR/2017 concerning the Acceleration of Construction Workforce Certification. The purpose of this study is to see certified construction workers in order to have superior competed. The research method used is a qualitative method with a descriptive approach. The data techniques used included interviews, observation and documentation. The theory used is the Van Horn and Van Meter theory which consists of six dimensions, namely Policy Targets and Standards, Policy Resources, Characteristics of Implementing Agencies, Attitudes of Implementers, Inter-Organizational Communication and Implementing Activities, Economic, Social and Political Environment. The results showed that the Construction Workers Certification Acceleration in Palembang City had been carried out well. In this case, the authors suggest to provide input to the Public Works and Spatial Planning Office to coordinate in the training places for construction workers such as the building hall or hall so that it can be carried out better and can run sustainably.*

**Keywords:** *Implementatio, Acceleration, Certification Construction Workforce.*

Advisor I



**Drs. Joko Siswanto, M.SI**  
NIP. 195706051985031003

Advisor II



**Dra. Retno Susilowaty, MM.**  
NIP. 195905201985032003

Palembang, December 2020  
Ketua Jurusan Administrasi Publik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Sriwijaya



**Zailani Surya Marpaung, S.Sos.MPA**  
NIP.198108272009121002

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas segala kasih dan karunia-Nya yang melimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi Kebijakan Percepatan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi di Kota Palembang”** guna dapat menyelesaikan Pendidikan sarjana S-1 Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Sriwijaya.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Sehubungan dengan itu, penulis berterimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua saya Bapak Mirza Mukhlisi, SE dan Ibu Linda Fitria, SE yang tiada henti memberikan doa motivasi dan dukungan baik moril maupun materi serta pengorbanan yang tiada henti-hentinya yang tidak bisa terbalas.
2. Bapak Prof. Dr. Kgs. M Sobri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Zailani Surya Marpaung, S.Sos, MPA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Drs. Joko Siswanto. M.Si selaku pembimbing pertama saya yang tiada henti-hentinya memberikan masukan dan memotivasi saya untuk menyelesaikan skripsi.
5. Ibu Dra. Retno Susilowaty, Mm selaku pembimbing kedua saya yang juga tiada henti-hentinya memberikan masukan dan memotivasi saya untuk menyelesaikan skripsi.
6. Seluruh Dosen, Staf dan Karyawan Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
7. Seluruh Bapak/Ibu Pejabat, staf, dan Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang khususnya di Bidang Jasa Konstruksi.
8. Teman - teman kuliah Administrasi Publik Angkatan 2016 yang sering membantu dan memberikan ide serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Organisasiku “HIMAFISIPAL” yang telah mengajarkan saya bagaimana dunia organisasi dalam perkuliahanku.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan dalam pembuatan skripsi ini. Semua tidak lain karena keterbatasan kemampuan penulis sebagai manusia biasa, maka dari itu penulis mengharapkan saran dan kritik untuk lebih memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terdapat diskripsi ini. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat dan bisa menjadi contoh bagi semua pembaca dengan segala kekurangan dan kelebihannya.

Palembang, November 2020

Rachmita Siti Pratiwi

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISTILAH.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
1. Manfaat Teoritis .....	7
2. Manfaat Praktis.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>8</b>
A. Landasan Teori .....	8
B. Kebijakan Publik .....	8
C. Implementasi Kebijakan Publik .....	11
D. Model Teori Implementasi .....	13
E. Teori Yang Digunakan .....	19
F. Penelitian Terdahulu.....	22
G. Kerangka Pemikiran .....	24
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>25</b>
A. Jenis Penelitian .....	25
B. Definisi Konsep .....	25
C. Fokus Penelitian .....	27
D. Informan Penelitian .....	29
E. Teknik Pengumpulan Data .....	30
F. Teknik Analisis Data .....	31
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....</b>	<b>32</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	32
1. Sejarah Singkat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	



Palembang .....	32
2. Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang .....	35
3. Strategis dan Arah Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang .....	36
4. Arti Lambang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang .....	37
5. Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang .....	39
6. Susunan Organisasi dan Tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang .....	40
7. Bagian Jasa Konstruksi .....	40
B. Implementasi Kebijakan Percepatan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi di Kota Palembang .....	42
1. Percepatan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Pada Variabel Standar dan Sasaran Kebijakan .....	43
2. Percepatan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Pada Variabel Sumber Daya.....	46
3. Percepatan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Pada Variabel Karakteristik Agen Pelaksana .....	53
4. Percepatan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Pada Variabel Sikap Para Pelaksana .....	56
5. Percepatan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Pada Variabel Komunikasi Antar Organisasi.....	59
6. Percepatan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Pada Variabel Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik .....	62
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>69</b>
A. KESIMPULAN .....	69
B. SARAN .....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>72</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. PenelitianTerdahulu.....	23
2. Fokus Penelitian .....	29
3. Jumlah Sumber Daya Manusia.....	53
4. Kualifikasi Sumber Daya Manusia.....	53
5. Fasilitas dan Peralatan yang diberikan pada Percepatan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi.....	56
6. Anggaran Dana Kegiatan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi.....	67

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kegiatan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi di Kota Palembang .....	4
2. Persentase Tenaga Kerja Konstruksi .....	5
3. Tahap-tahap Kebijakan Publik .....	10
4. Teori Model Implementasi George C. Edward III .....	15
5. Teori Model Implementasi Van Meter dan Carl E. Van Horn .....	19
6. Kerangka Pemikiran .....	25
7. Logo Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang .....	40
8. Struktur Organisasi Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang .....	42
9. Rapat Evaluasi Panitia/Tim Pelaksana Dalam Pelaksanaan Penyelenggara Percepatan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi .....	54
10. Pengarahan dan Pembekalan Percepatan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi.....	61
11. Peresmian Pembekalan Kegiatan Percepatan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi.....	70

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Dokumentasi tentang Percepatan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi di Palembang.
2. Undang-Undang No 2 Tahun 2017
3. Surat Edaran Walikota Palembang Nomor 64.A/SE/DPUPR/2017 tentang Percepatan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi.
4. Surat Edaran Gubernur Sumatera Selatan No 560/0465/DPKP-SS/2019 untuk mewajibkan sertifikasi kompetensi tenaga kerja konstruksi.
5. Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang Nomor:600/492/DPUPR/2020 tentang Panitia/Tim Pelaksana.
6. Surat Balasan Izin Penelitian di Dinas PUPR
7. Surat Keputusan Pembimbing Skripsi
8. Kartu Bimbingan Usulan Skripsi Pembimbing I
9. Kartu Bimbingan Usulan Skripsi Pembimbing II
10. Lembar Revisi Ujian Seminar Proposal Pembimbing I
11. Lembar Revisi Ujian Seminar Proposal Pembimbing I
12. Lembar Revisi Ujian Seminar Proposal Penguji I
13. Kartu Bimbingan Skripsi Pembimbing I
14. Kartu Bimbingan Skripsi Pembimbing II

## DAFTAR SINGKATAN

UUJK	: Undang-Undang Jasa Konstruksi
LPJK	: Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
PUPR	: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
Jakon	: Jasa Konstruksi
APBN	: Anggaran Pendapatan Belanja Negara
APB	: Alat Pelindung Daerah

## DAFTAR ISTILAH

<i>Building Construction</i>	: Pembangunan Gedung
<i>Venice Of The East</i>	: Venisia dari timur bukannya alasan
Kopaja	: Koperasi Angkatan Kota Palembang
Profesional	: Pekerja yang melaksanakan tugas sesuai ahlinya
Pembangunan Regional	: Usaha Meningkatkan Kualitas Lingkungan
Drainase	: Pembuangan massa air secara alam

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Chandler dan Plano dalam Keban (2004:3) mengemukakan definisi Administrasi Publik sebagai berikut:

“Bahasan ilmu sosial yang merujuk pada kegiatan dalam mencapai tujuan negara yang meliputi lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif serta hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan publik. Administrasi publik bentuk kerjasama yang dilakukan oleh lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan publik secara efektif dan efisien.”

Adapun peran administrasi publik untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar mencapai efektifitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, sumber daya manusia di Indonesia masih kurang berkualitas dalam bersaing salah satunya di bidang Jasa Konstruksi.

Menurut Djoko Triyanto (2004) menyatakan Jasa Konstruksi sesungguhnya merupakan bagian penting dari terbentuknya produk konstruksi, karena jasa konstruksi menjadi arena pertemuan antara penyediaan jasa dan penggunaan jasa.

Menurut Undang-Undang No 2 Tahun 2017 mengemukakan Jasa Konstruksi sebagai berikut:

“layanan jasa konsultasi konstruksi atau pekerjaan konstruksi. Sektor Jasa Konstruksi merupakan kegiatan masyarakat mewujudkan bangunan yang berfungsi sebagai pendukung sarana dan prasarana aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional. Pengertian Jasa Konstruksi juga merupakan suatu kegiatan untuk membangun sarana ataupun prasarana yang pada pengerjaannya meliputi pembangunan gedung (*building construction*), instalasi mekanikal ataupun elektrikal, dan pembangunan.”

Sektor konstruksi memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap pembangunan infrastruktur sehingga mendukung terjaminnya keberlanjutan pembangunan tersebut dan terus dikembangkan agar lebih inovatif dan produktif



dalam menghasilkan. Penyediaan Jasa Konstruksi adalah Tenaga kerja konstruksi atau Badan Usaha Jasa Konstruksi yang kegiatannya menyediakan layanan Jasa Konstruksi baik itu perencanaan konstruksi, pelaksanaan konstruksi dan pegawai konstruksi.

Di Jasa Konstruksi pembangunan infrastruktur beberapa tahun terakhir masih kurang efektif, tenaga kerja di bidang konstruksi masih banyak yang belum sertifikasi karena masih kurangnya pengetahuan informasi di media cetak maupun media massa, kurangnya pemahaman atau keinginan dari pekerja itu sendiri dan masih kurangnya arahan dari pemerintah untuk lebih memperhatikan tenaga kerja di bidang konstruksi. Sehingga banyak proyek pembangunan yang dilakukan, khususnya proyek strategis nasional menggunakan tenaga kerja dari Pulau Jawa dikarenakan kontraktor kesulitan dalam mendapatkan tenaga kerja yang sudah memiliki sertifikasi.

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dilaksanakan berlandaskan pada atas kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan dan keselamatan, kebebasan, pembangunan berkelanjutan, serta berwawasan lingkungan. Dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Pemerintah Pusat melakukan pembinaan yang mencakup penetapan kebijakan, penyelenggaraan kebijakan, pemantauan dan evaluasi, pelaporan serta penyelenggaraan pemberdayaan terhadap Pemerintah Daerah. Untuk menyediakan data dan informasi yang akurat dan terintegrasi dibentuk suatu sistem informasi Jasa Konstruksi yang terintegrasi dan dikelola oleh Pemerintah Pusat. Salah satu lembaga membantu pemerintah dalam mewujudkan tenaga kerja berkualitas adalah LPJK (Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi).

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi adalah organisasi penyelenggara peran masyarakat Jasa Konstruksi dalam melaksanakan pengembangan Jasa Konstruksi dan menetapkan standar kemampuan Badan Usaha dan Tenaga Kerja Jasa Konstruksi. Tugas pokok LPJK (Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi):

1. Melakukan dan mendorong penelitian dan pengembangan Jasa Konstruksi.
2. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Jasa Konstruksi.
3. Melakukan registrasi tenaga kerja konstruksi yang meliputi klasifikasi, kualifikasi, dan sertifikasi keterampilan dan keahlian kerja.
4. Mendorong dan meningkatkan peran arbitrase, mediasi dan penilaian ahli di bidang Jasa Konstruksi.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi mengatur penyelenggaraan Jasa Konstruksi dengan tujuan untuk memberikan arah pertumbuhan atau perkembangan dan mewujudkan struktur usaha yang kukuh, andal, berdaya saing tinggi yang lebih berkualitas dalam mewujudkan tertib penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam menjalankan hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat di bidang Jasa Konstruksi.

Sertifikasi menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi Bab I Pasal 1 memiliki pengertian sebagai berikut:

1. Sertifikasi Badan Usaha adalah tanda bukti pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan badan usaha Jasa Konstruksi termasuk hasil penyeteraan kemampuan badan usaha Jasa Konstruksi asing.
2. Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian sertifikasi Kompetensi melalui uji kompetensi sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia, standar internasional dan standar khusus.
3. Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah tanda bukti pengakuan kompetensi tenaga kerja konstruksi.

4. Tanda Daftar Usaha Perseorangan adalah izin yang diberikan kepada usaha perseorangan untuk menyelenggarakan kegiatan Jasa Konstruksi.

Dalam mewujudkan peningkatan kualitas Tenaga Kerja Konstruksi yang bertujuan sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi Bab II Pasal 3 sebagai berikut:

1. Memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan Jasa Konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kukuh, andal, berdaya saing yang tinggi, dan hasil Jasa Konstruksi yang berkualitas.
2. Mewujudkan ketertiban penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam menjalankan hak dan kewajiban serta meningkatkan kepatuhan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
3. Mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat di bidang Jasa Konstruksi.
4. Menata sistem Jasa Konstruksi yang mampu mewujudkan keselamatan publik dan menciptakan kenyamanan lingkungan terbangun.
5. Menjamin tata kelola penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang baik.
6. Menciptakan integrasi nilai tambah dari seluruh tahapan penyelenggaraan Jasa Konstruksi.



*Gambar 1.1 Kegiatan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Di Kota Palembang.*

Jumlah Tenaga Kerja di bidang Jasa Konstruksi tahun 2019 sebagai berikut:

$$\frac{12.500}{203.000} \times 100 = 61,6\%$$

Gambar 1.2 Persentase Tenaga Kerja Konstruksi  
*Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*

Berdasarkan Gambar 1.2 dapat diketahui bahwa 203.000 jumlah Tenaga Kerja Konstruksi di Bidang Jasa Konstruksi di Kota Palembang akan tetapi yang sudah memiliki Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi sejumlah 12.500, jika dipersentasikan sebesar 61,6%.

Sumber daya manusia di bidang Jasa Konstruksi yang belum bersaing mengakibatkan pekerja konstruksi di Kota Palembang masih sedikit yang memiliki sertifikasi, sedangkan kebutuhan dibidang konstruksi sangat banyak yang membutuhkan tenaga kerja konstruksi yang terampil dan unggul. Sehingga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang konstruksi dengan adanya sertifikasi tenaga kerja konstruksi.

Untuk mewujudkan Tenaga Kerja Konstruksi yang bersertifikasi agar memiliki daya saing yang unggul, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Palembang sebagai penyelenggara bekerjasama dengan Balai Jakon wilayah II, LPJK, dan Stakeholder yang terkait dalam melakukan Pelatihan dan Sertifikasi gratis bagi Tenaga Kerja Konstruksi. Dalam menjalankan percepatan Jasa Konstruksi agar dapat mempunyai target bersertifikasi, Gubernur Sumatera Selatan No 560/0465/DPKP-SS/2019 untuk mewajibkan sertifikasi kompetensi tenaga kerja konstruksi pada seluruh pekerjaan di bidang konstruksi di Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Selatan dan mengeluarkan Surat Edaran yang ditunjukkan kepada seluruh Bupati/Walikota untuk pekerja Jasa Konstruksi. Surat Edaran direspon oleh Walikota Kota Palembang, dengan mengeluarkan Surat Edaran Jasa Konstruksi Nomor

64.A/SE/DPUPR/2017 tentang Percepatan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi yang berisi:

1. Setiap tenaga kerja konstruksi yang bekerja di bidang jasa konstruksi wajib memiliki Sertifikasi Kompetensi Kerja (Pasal 70 Ayat 1).
2. Setiap pengguna Jasa atau penyedia Jasa wajib mempekerjakan tenaga kerja konstruksi yang memiliki Sertifikasi Kompetensi Kerja (Pasal 70 ayat 1)
3. Setiap pengguna Jasa atau Penyedia Jasa yang mempekerjakan tenaga kerja Konstruksi yang tidak memiliki Sertifikasi Kompetensi Kerja dikenai sanksi administratif berupa denda administratif atau penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi (Pasal 99 ayat 2).

Surat Edaran Jasa Konstruksi Nomor 64.A/SE/DPUPR/2017 tentang Percepatan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi sesuai dengan Undang-Undang No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, bertujuan untuk mengurangi angka Tenaga Kerja Konstruksi yang belum bersertifikasi di Jasa Konstruksi agar lebih maju dan unggul. Menata sistem Jasa Konstruksi yang mampu mewujudkan keselamatan publik dan menciptakan kenyamanan lingkungan terbangun serta menjamin tata kelola penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang baik dalam menciptakan integrasi nilai tambah dari seluruh tahapan penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, dirumuskan permasalahan penelitian yaitu, Bagaimana Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Sertifikasi Tenaga Kerja Jasa Konstruksi di Kota Palembang?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Kebijakan Percepatan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Di Kota Palembang.

## **D. Manfaat Penelitian**

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian diharapkan untuk dapat menambah pengetahuan, masukan dan bisa sebagai bahan referensi bagi jurusan Administrasi Publik khususnya konsentrasi Kebijakan Publik.

### 2. Manfaat Praktis

Sebagai memberikan masukan bagi pihak atau instansi terkait dalam melaksanakan Kebijakan Percepatan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi di Kota Palembang.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

- Purwanto, Erwan Agus, dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2015. *Implementasi Kebijakan Publik*. Gava Media. Yogyakarta.
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. CV. Alfaberta : Bandung.
- Abidin, Said Zainal. 2004. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Yayasan Pancur Siwah.
- Subarsono, DRS.AG, M.Si., MA. 2015. *Analisis Kebijakan Publik*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Thotha, Mifta. 2008. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer. Katalog Dalam Terbitan*. Jakarta.
- Sugiyono, Prof. DR. 2017. *Metode Penelitian*. Alfabeta. Bandung.
- Nugroho, DR. Riant. 2014. *Public Policy*. PT Alex Media Komputindo. Jakarta.

### **Peraturan-Peraturan:**

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
- Surat Edaran Nomor 64.a/SE/DPUPR/2017 tentang Percepatan Sertifikasi Tenaga Jasa Konstruksi.
- Gubernur Sumatera Selatan No 560/0465/DPKP-SS/2019 untuk mewajibkan sertifikasi kompetensi tenaga kerja konstruksi.

### **Sumber lain-lain:**

- Indah Salsabilah. 2012. *Kajian Teori Kebijakan Publik*, (Online), (<https://eprints.uny.ac.id/8530/3/BAB%202%20-%2007401241045.pdf>, diakses 12 Agustus 2014).
- Zulkarnair Umar. 2012. *Analisis dan Kebijakan Publik*, (Online), (<https://journal.unhas.ac.id/index.php/jakpp/article/download/4068/2330>, diakses 1 Juni 2017).
- Haedar Akib. 2009. *Implementasi Kebijakan: APA, MENGAPA, BAGAIMANA*, (Online), (<https://media.neliti.com/media/publications/97794-ID-implementasi-kebijakan-apa-mengapa-dan-b.pdf>, diakses 10 Januari 2010).



- Idtesis.com. 2014. *Teori Kebijakan Publik Menurut Para Ahli*, (Online), (<https://idtesis.com/teori-kebijakan-publik-menurut-para-ahli/>, diakses 8 April 2014).
- Zakky. 2018. *Implementasi Menurut Para Ahli, KBBI, dan Secara Umum*, (Online), (<https://www.zonareferensi.com/pengertian-implementasi/>, diakses 27 Agustus 2018).
- Mohammad Bachrudin Yusuf. 2018. *Perbedaan Undang-Undang Jasa Konstruksi 1999 dan 2017 terkait dengan upaya peningkatan mutu konstruksi*, (Online), (<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/5768/TUGAS%20AKHIR.pdf?sequence=1>, diakses 19 Agustus 2018).
- Jefri Tumelap. 2014. *Analisis Kinerja Peusahaan Jasa Pelaksana Konstruksi*, (Online), (<https://media.neliti.com/media/publications/99224-ID-analisis-kinerja-perusahaan-jasa-pelaksa.pdf>, diakses 9 September 2014).
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. 2019. *Visi Misi, Sejarah, Tugas dan Fungsi, Struktur Organisasi, Motto dan Lambang*, (Online), (<https://www.pu.go.id>, diakses 3 Febuari 2019).